

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST"), yaitu:

A. Pada
Hari,Tanggal : Jumat, 13 Agustus 2021.
Waktu : Pukul 13.56 WIB s.d. 16.43 WIB.
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Lantai Dasar, Garuda City,
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang - 15111, Indonesia.

dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, penjelasan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

2. Penetapan tuntutan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Perpanjangan Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi yang telah diterbitkan pada tahun 2021 serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.

5. Pengukuran Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:
a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.

6. Persetujuan pemberian jaminan aset Perseroan, dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

Direksi
1. Bapak Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama.
2. Bapak Dony Oskaria selaku Wakil Direktur Utama.
3. Bapak Prasetyo selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
4. Bapak Aryaperwira Adileksana selaku Direktur Human Capital.
5. Bapak Mohammad Rizal Pahlevi selaku Direktur Niaga dan Kargo.
6. Bapak Rahmat Hanafi selaku Direktur Teknik.
7. Bapak Tumpal Manupuk Hutapea selaku Direktur Operasi.
8. Bapak Ade Ruchyati Susardi selaku Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi.

Dewan Komisaris

1. Bapak Triawan Munaf selaku Komisaris Utama.
2. Bapak Chairal Tanjung selaku Wakil Komisaris Utama.
3. Bapak Elisa Lumbantoruan selaku Komisaris Independen.
4. Bapak Peter Frans Gontha selaku Komisaris.

C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 23.085.526.128 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,18% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPST tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebanyak 1 (satu) orang pemegang saham terkait mata acara 1.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:
Keputusan RUPST diambil dengan cara pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir langsung dan dengan menggunakan sistem e-voting di aplikasi eASYKSEI pada menu E-meeting Hall yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara I	23.043.565.083 saha atau 99,81% bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	41.955.845 saha atau 0,18% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	5.200 saha dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara II	23.082.648.517 saha atau 99,98% saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	2.872.291 saha atau 0,012% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	5.320 saha dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara III	23.082.660.837 saha atau 99,98% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	2.863.191 saha atau 0,012% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	2.100 saha dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara IV	23.085.503.328 saha atau 99,99% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	500 saha dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	22.300 saha dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara V	23.085.504.728 saha atau 99,99% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	500 saha dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	20.900 saha dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara VI	23.043.565.283 saha atau 99,81% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	41.944.125 saha atau 0,182% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	16.720 saha dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata Acara VII	23.043.574.783 saha atau 99,81% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	41.937.925 saha atau 0,182% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	13.420 saha dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

H. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama :**
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020, serta penjelasan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sebagaimana dimuat dalam Laporan No. 01318/2.1025/AU.1/06/1130-2/1/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.
 - Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sebagaimana dimuat dalam Laporan No. 01301/2.1025/AU.2/11/1130-2/1/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir pada 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Insentif Kinerja Tahun Buku 2020 dan Remunerasi (Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun 2021 bagi Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Insentif Kinerja Tahun Buku 2020 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun Buku 2021 bagi Direksi Perseroan.

Mata Acara Ketiga

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 ataupun audit atas Laporan Keuangan khusus tertunda pada tahun 2021 serta audit Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2021.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut serta menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat

Menyetujui Perpanjangan Pemberian Wewenang dan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menyatakan Kepastian Jumlah Modal dan Jumlah Saham Baru hasil Pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi yang telah diterbitkan pada tahun 2021 serta untuk Melakukan Segala Tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan Jumlah Peningkatan Modal Perseroan.

Mata Acara Kelima

Mengukuhkan pemberlakuan:

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya; dan
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.

Mata Acara Keenam

Menyetujui penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dalam rangka perolehan pendanaan dan memberikan kewenangan kepada Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dalam rangka perolehan pendanaan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan pasar modal.

Mata Acara Ketujuh

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:

- Irfan Setiaputra sebagai Komisaris Utama;
- Peter F. Gontha sebagai Komisaris;
- Zannuba Arifah Ch. R sebagai Komisaris Independen;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Komisaris Independen;
- Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama;
- Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris Independen;
- Prasetyo sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade Ruchyati Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Aryaperwira Adileksana sebagai Wakil Komisaris;
- Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade R. Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Triawan Munaf sebagai Wakil Komisaris;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris;
- Peter Frans Gontha sebagai Wakil Komisaris;
- Irfan Setiaputra sebagai Wakil Komisaris;
- Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris;
- Prasetyo sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade Ruchyati Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Aryaperwira Adileksana sebagai Wakil Komisaris;
- Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade R. Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Triwan Munaf sebagai Wakil Komisaris;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris;
- Prasetyo sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade Ruchyati Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Aryaperwira Adileksana sebagai Wakil Komisaris;
- Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade R. Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Triwan Munaf sebagai Wakil Komisaris;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris;
- Prasetyo sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade Ruchyati Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Aryaperwira Adileksana sebagai Wakil Komisaris;
- Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade R. Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Triwan Munaf sebagai Wakil Komisaris;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris;
- Prasetyo sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade Ruchyati Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Aryaperwira Adileksana sebagai Wakil Komisaris;
- Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade R. Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Triwan Munaf sebagai Wakil Komisaris;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris;
- Prasetyo sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade Ruchyati Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Aryaperwira Adileksana sebagai Wakil Komisaris;
- Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade R. Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Triwan Munaf sebagai Wakil Komisaris;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris;
- Prasetyo sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade Ruchyati Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Aryaperwira Adileksana sebagai Wakil Komisaris;
- Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade R. Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Triwan Munaf sebagai Wakil Komisaris;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris;
- Prasetyo sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade Ruchyati Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Aryaperwira Adileksana sebagai Wakil Komisaris;
- Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade R. Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Triwan Munaf sebagai Wakil Komisaris;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris;
- Prasetyo sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade Ruchyati Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Aryaperwira Adileksana sebagai Wakil Komisaris;
- Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade R. Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Triwan Munaf sebagai Wakil Komisaris;
- Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris;
- Elisa Lumbantoruan sebagai Wakil Komisaris;
- Prasetyo sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil Komisaris;
- Tumpal Manupuk Hutapea sebagai Wakil Komisaris;
- Ade Ruchyati Susardi sebagai Wakil Komisaris;
- Aryaperwira Adileksana sebagai Wakil Komisaris;
- Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Wakil Komisaris;
- Rahmat Hanafi sebagai Wakil